

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ABAD 21 :
MEMPERSIAPKAN GENERASI MUDA MENGHADAPI
MASA DEPAN YANG PENUH TANTANGAN**

Rini Tri Rahayu¹, Alya Trisnasiwi², Hasan Hanafi³

¹Administrasi Publik, University Gunungkidul

²Administrasi Publik, University Gunungkidul

³Administrasi Publik, University Gunungkidul

Email: rinitriahayu1@gmail.com, alyatrisna8@gmail.com, hasanafi47@gmail.com

Abstract

This research examines 21st-century educational policies implemented by the Gunungkidul Department of Education to prepare young generations for a challenging future. These policies encompass multiple aspects, including the affirmation of educational goals, regulation and operational control of educational institutions, and discretionary actions granting schools autonomy to tailor learning approaches. Through problem-solving strategies, such as utilizing technology to address digital divides and enforcing sanctioned behaviors for institutions failing to meet standards, these policies aim to achieve equitable and quality education. Additionally, these policies establish consistent behavioral norms, yield policy outputs relevant to local needs, and play a role in raising public awareness of the importance of 21st-century skills-based education. With public support and consistency in application, these educational policies are expected to enhance education quality and create a generation that is competent, of strong character, and adaptable to changing times.

Keywords: *Education Policy, 21st-Century Skills, Student Character, Educational Technology*

PENDAHULUAN

Era digital terus mengalami perkembangan pesat, dan transformasi teknologi telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Tantangan yang muncul dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan dalam dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan inovasi dalam dunia pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Pendidikan sangat penting untuk membekali individu dalam menghadapi tuntutan zaman yang senantiasa berubah. Perubahan ini tak terhindarkan bagi semua lapisan masyarakat, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang datang bagaikan gelombang tsunami, tak dapat dikendalikan oleh siapapun. Perkembangan ini tidak membedakan status sosial, baik di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, tinggi, terbelakang, maupun di daerah pedesaan, dan terus meluas hingga mencapai tingkat lokal di desa. (Hermansyah, et al, 2021).

Copyright ©Rini Tri Rahayu¹, Alya Trisnasiwi², Hasan Hanafi³. 2024

Corresponding author :

Email : rinitriahayu1@gmail.com, alyatrisna8@gmail.com, hasanafi47@gmail.com

Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital agar individu dapat menguasai keterampilan penting abad 21, seperti pemecahan masalah, kreativitas, literasi digital, dan kemampuan berkolaborasi. Hal ini penting agar mereka dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika era digital. Akibatnya, kebutuhan akan keterampilan yang lebih luas, bukan sekadar transfer pengetahuan secara tradisional. Pendidikan saat ini diharapkan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pengembangan individu yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman. (Pare, A.,2023)

Namun, tantangan pembentukan karakter generasi muda saat ini semakin kompleks dengan adanya krisis moral dan etika. Hal ini memunculkan tantangan mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pendidikan, mengembangkan keterampilan digital, dan mengajarkan literasi digital yang diperlukan di era digital ini. Di balik kemajuan teknologi yang pesat, terdapat pula sisi kelam yang patut diwaspadai. Penyebaran informasi palsu, kecanduan media sosial, pergeseran pola konsumsi, dan pelanggaran privasi menjadi contoh nyata dampak negatif teknologi yang dapat menggerogoti integritas moral bangsa Indonesia (Ulfah, 2020).

Teknologi dalam pembelajaran juga berpengaruh terhadap tantangan pendidikan. Adanya teknologi sebenarnya memberikan dampak positif yang sangat mendukung kegiatan pendidikan, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri, baik dari pihak generasi muda maupun pendidik. Dengan perkembangan teknologi, generasi muda diharapkan dapat berpartisipasi aktif, melakukan eksperimen, dan mengambil keputusan yang berdampak pada hasil yang mereka hadapi, karena teknologi pembelajaran memungkinkan mereka menerima umpan balik instan tentang kinerja mereka. Hal ini membantu mereka memperbaiki pemahaman, mengidentifikasi kelemahan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah secara lebih efektif (Said. 2023).

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pendidikan abad ke-21 dapat menjadi dasar yang kokoh untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang penuh tantangan, khususnya dalam konteks era digital yang terus berkembang. Untuk memperkuat keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan integrasi elemen-elemen keterampilan abad ke-21, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pendekatan pendidikan yang komprehensif dapat membentuk keterampilan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan teknologi digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran kebijakan pendidikan dalam membentuk generasi muda yang siap menghadapi perubahan di era digital serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, diharapkan juga dapat memberikan pandangan komprehensif dalam merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan

Setiap negara mempunyai arti berbeda untuk kata “kebijakan”. Dalam bahasa Inggris artinya rencana atau aturan. Dalam bahasa Latin, ini berkaitan dengan politik dan bahasa. Dalam bahasa Yunani berarti suatu negara, dan dalam bahasa Sanskerta berarti kota. Kebijakan adalah usulan yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin ada tantangan dan peluang dalam menjalankan suatu kebijakan (RD et al., 2021).

Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Oleh karena itu kebijakan secara praktis dapat di fahami sebagai keputusan pemerintah, *as decision of government* sebagai bentuk pengesahan formal *as formal authorization*, sebagai program *as programme*, sebagai keluaran *as output*, sebagai hasil akhir *as outcome* dan sebagai teori atau model *as a theory or model* serta sebagai proses *as process*). (Alfirzan, Nasri, and Gistituati 2021)

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga mendidik. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepada pihak sekolah agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan kesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. (Nurani S,2010).

Kebijakan pendidikan muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan. Permasalahan ini timbul akibat adanya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang merumuskan langkah-langkah dan tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi dan misi pendidikan, yang bertujuan untuk mencapai target pendidikan dalam waktu tertentu.

Pendapat Duke dan Canady dalam Mudjia Rahardjo, (2010) yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu :

- 1) Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan.
- 2) Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya.
- 3) Kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional.
- 4) Kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan masalah
- 5) Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi
- 6) Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif.
- 7) Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan.
- 8) Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.

B. Pendidikan Abad 21

Abad 21 memiliki tuntutan dan tantangan bagi dunia pendidikan. Abad 21 menuntut siswa untuk memiliki kemampuan kecakapan hidup. Karena siswa bukan hanya bersaing di negaranya, namun dengan negara lainnya. Keterampilan Abad 21 membuat dunia pendidikan untuk menyiapkan generasi masa depan, siap menghadapi kehidupan di era serba kompetitif ini. Dalam kegiatan pembelajaran di Abad 21 harus benar-benar mampu mencetak siswa yang memiliki kualitas dan daya saing di dunia global (Hadayani et al, 2020).

Pada abad-21 ini disebut juga dengan era digital, hal ini ditandai dengan akses internet yang meluas dan dapat digunakan berbagai macam aktivitas seperti dunia bisnis, hiburan dan bahkan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran sekarang ini banyak melibatkan internet untuk mendapatkan informasi, serta menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Menurut (Prihantini, 2021) peserta didik saat ini berbeda dengan peserta didik sebelumnya yang mana saat ini peserta didik dapat mengakses informasi secara cepat bahkan lebih cepat dari gurunya.

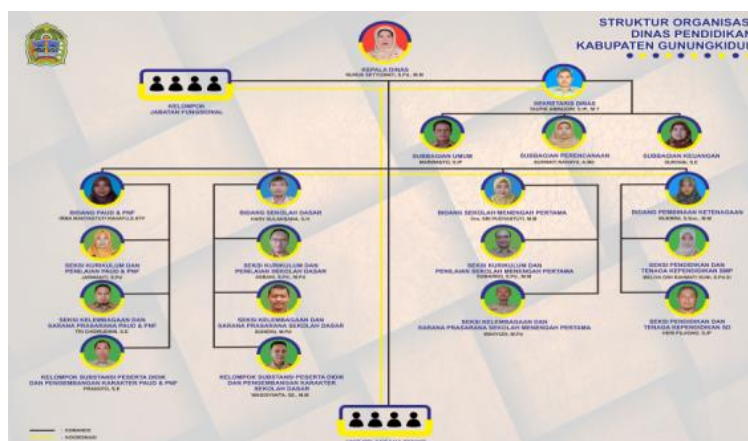
METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Gunungkidul yang terletak di Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun informan yang dimaksud adalah : Kepala Dinas, Pembinaan Bidang Pendidikan, dan Pembinaan Bidang Karakter. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan. Sehingga mendapat data sekunder maupun data primer. Berikut penjabaran hasil penelitian yang di peroleh peneliti :

Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan perangkat daerah dalam bentuk dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan Gunungkidul memiliki struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Gunungkidul
Sumber : Dinas Pendidikan Gunungkidul

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap informan penelitian maka diperoleh gambaran tentang Kebijakan Pendidikan Abad 21 : Mempersiapkan Generasi Muda Menghadapi Masa Depan Yang Penuh Tantangan. Dalam konteks ini Dinas Pendidikan Gunungkidul telah menunjukkan kebijakan pendidikan melalui 1) Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) Kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, 4) Kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6) Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif, 7) Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, 8) Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem. Adapun Kebijakan pendidikan abad 21 di Dinas Pendidikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai Penegasan Maksud dan Tujuan

Kebijakan dalam konteks pendidikan abad 21 merupakan pernyataan yang menegaskan tujuan pendidikan yang harus dicapai. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan cepat di dunia global, melalui pengembangan keterampilan-keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas.

Dengan kebijakan yang terfokus pada tujuan seperti akses pendidikan merata, kualitas pendidikan yang meningkat, dan penanaman karakter, institusi pendidikan memiliki pedoman yang jelas. Di Gunungkidul, kebijakan ini dijalankan untuk mengembangkan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis.

2. Kebijakan sebagai Sekumpulan Keputusan untuk Mengatur, Mengendalikan, dan Melayani

Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan mencakup berbagai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Gunungkidul, untuk mengarahkan sekolah dan lembaga pendidikan lain dalam pelaksanaan program-program pendidikan. Keputusan ini mencakup pengembangan kurikulum, standar pendidikan, hingga prosedur operasional yang harus diikuti.

Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pengontrol terhadap kegiatan yang dilakukan sekolah, memastikan bahwa implementasi pembelajaran

berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, penerapan kurikulum yang fleksibel dan integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah beberapa contoh kebijakan yang mengatur pendidikan agar sejalan dengan kebutuhan masa depan.

3. Kebijakan sebagai Panduan Tindakan Diskresional

Kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai panduan tindakan diskresional, memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Dalam kebijakan pendidikan abad 21, sekolah diberikan otonomi untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, terutama dalam pembinaan karakter.

Guru diberi kebebasan untuk menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan potensi siswa. Misalnya, dengan adanya Kurikulum Merdeka di Indonesia, guru dapat melakukan pendekatan berbasis proyek yang menanamkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan empati.

4. Kebijakan sebagai Strategi untuk Memecahkan Masalah

Dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern, kebijakan juga dipandang sebagai strategi yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pendidikan di abad 21 menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital dan kebutuhan keterampilan baru. Kebijakan seperti pemanfaatan teknologi di sekolah dan pengembangan keterampilan abad 21 diharapkan dapat mengatasi kendala ini.

Di Gunungkidul, strategi ini diterapkan dengan memperhatikan akses teknologi bagi siswa, khususnya di daerah terpencil. Pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyediakan akses internet dan perangkat belajar, yang berfungsi sebagai solusi atas keterbatasan sarana digital.

5. Kebijakan sebagai Perilaku yang Bersanksi

Kebijakan pendidikan juga mengatur perilaku lembaga pendidikan dengan menetapkan sanksi jika kebijakan tidak dijalankan. Hal ini memastikan bahwa tujuan pendidikan tetap tercapai dan bahwa semua sekolah mematuhi standar yang telah ditentukan.

Dinas Pendidikan Gunungkidul, misalnya, memberikan peringatan atau sanksi terhadap sekolah yang tidak menjalankan kebijakan sesuai ketentuan. Ini dapat berupa teguran atau pembatasan bantuan dana, dengan tujuan menegakkan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah.

6. Kebijakan sebagai Norma Perilaku dengan Konsistensi

Norma yang ditetapkan dalam kebijakan pendidikan memastikan adanya konsistensi dalam penerapannya di seluruh wilayah. Kebijakan ini mendorong setiap sekolah untuk menerapkan program pengembangan karakter siswa, seperti disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten.

Misalnya, melalui program "Sekolah Ramah Anak," kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan karakter siswa. Kebijakan ini diterapkan dengan penekanan pada konsistensi perilaku yang diharapkan dari siswa, guru, dan staf.

7. Kebijakan sebagai Keluaran dari Sistem Pembuatan Kebijakan

Kebijakan ini merupakan hasil akhir dari sistem pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai tahap dan pemangku kepentingan. Mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga konsultasi publik, proses ini memastikan bahwa

kebijakan yang dihasilkan adalah hasil konsensus dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di daerah.

Proses kebijakan di Dinas Pendidikan Gunungkidul melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, yang kemudian diformulasikan menjadi kebijakan final. Melalui cara ini, kebijakan yang diterapkan di Gunungkidul tidak hanya menyelesaikan masalah pendidikan tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal.

8. Kebijakan sebagai Pengaruh terhadap Pemahaman Publik

Kebijakan pendidikan tidak hanya ditetapkan untuk diikuti, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan Gunungkidul melakukan sosialisasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan kebijakan dan mendukung implementasinya.

Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan masyarakat yang mendukung, seperti partisipasi orang tua dalam pendidikan karakter siswa, kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak positif jangka panjang.

KESIMPULAN

Kebijakan Pendidikan Abad 21 di Dinas Pendidikan Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini dirancang dengan komprehensif untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Kebijakan ini tidak hanya menegaskan tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik daerah Gunungkidul, seperti peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, dan pembinaan karakter yang konsisten.

Kebijakan ini berperan dalam memberikan panduan yang fleksibel dan memberikan otonomi kepada sekolah dalam penerapannya, memungkinkan adaptasi sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan peserta didik. Kebijakan juga berfungsi sebagai strategi untuk mengatasi tantangan modern, termasuk kesenjangan digital, dengan menyediakan dukungan akses teknologi bagi siswa di berbagai wilayah.

Penegakan kebijakan melalui sanksi menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan kepatuhan sekolah terhadap standar kualitas yang ditetapkan. Konsistensi dalam pembinaan karakter dan norma perilaku dalam kebijakan ini juga mendukung pengembangan siswa yang berkarakter baik, yang diterapkan di seluruh wilayah secara seragam. Melalui proses sistematis dan kolaboratif, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang berorientasi masa depan. Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, kebijakan ini menjadi lebih mudah diterima dan diimplementasikan secara efektif, membawa dampak jangka panjang pada kualitas pendidikan dan kesiapan generasi muda Gunungkidul dalam menghadapi tantangan abad 21.

Saran

1. Pelatihan Guru: Tingkatkan pelatihan bagi guru dalam mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
2. Akses Teknologi: Perluas infrastruktur teknologi di daerah terpencil untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan semua siswa memiliki akses yang sama.

3. Keterlibatan Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam proses pendidikan melalui sosialisasi dan kolaborasi, agar kebijakan dapat diterima dan didukung secara luas.
4. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
5. Penguatan Karakter: Fokus pada program pembinaan karakter yang konsisten di seluruh sekolah untuk mendukung pengembangan siswa secara holistik.

REFRENSI

- Alfirzan, Aulia, Yuris Nasri, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Pendidikan Serta Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*5(1): 1521–29
- Fitri, L., Suanti, F., & Trisoni, R. (2024). Pengertian, Konsep, Teori dan Lingkup Sistem dan Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(2), 298-307.
- Hadayani, Dwi Okta, Delinah, And Nurlina. 2020. "Membangun Karakter Siswa Melalui Literasi Digital Dalam Menghadapi Pendidikan Abad 21 (Revolusi Industri 4.0)." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang* 21:999–1015
- Hermansyah, H., Muslim, M., & Ikhlas, I. (2021). Urgensi Pengembangan Keterampilan Belajar Abad 21 di Pendidikan Dasar. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 8(2), 215-226.
- Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 3
- Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010), hlm. 41
- Pare, A., & Sihotang, H. (2023). Pendidikan Holistik untuk Mengembangkan Keterampilan Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27778-27787.
- Prihantini. (2021). *Strategi Pembelajaran SD*(B. S. Fatmawati (ed.); 2021st ed.). PT Bumi Aksara
- RD, A. H., Subiyantoro, & Putra, R. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan di Aceh. *Bidayah*, 12(1), 103–125
- Said, S. (2023). Peran Teknologi Digital Sebagai Media Pembelajaran Di Era Abad 21. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*,6(2), 194-202
- Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Yusuf, M. (2023). *Inovasi Pendidikan Abad-21: Perspektif, Tantangan, dan Praktik Terkini*. Selat Media.